



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.YK

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3471045311000001, Tempat dan Tanggal Lahir, Yogyakarta, 13 November 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Gol. Darah A, Alamat: xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, No. HP: 08174723591, Email: [salshab841@gmail.com](mailto:salshab841@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1671133003020008, Tempat dan Tanggal Lahir, Palembang, 30 Maret 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Golongan Darah -, Alamat KTP: xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, **dan saat ini berdomisili di** Gang Tarjan rt, xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, No HP: 083876685271 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.YK Tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Tempel Nitikan UH 6/227, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekira pada bulan Desember 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, keras kepala, dan temperamen;

b. Bahwa sejak Oktober 2021, Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara memukuli badan Penggugat dan melakukan kekerasan secara verbal seperti memaki dan mengumpat kepada Penggugat;

c. Bahwa sejak bulan September 2024, Tergugat mulai sering mengonsumsi obat-obatan terlarang dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang bertujuan untuk menyakiti Penggugat;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2025 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat tidak dikenal/ tidak diketahui di alamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat tidak dikenal/ tidak diketahui di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 35/Pdt.G/2025/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rejab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan serta Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Drs. H. Bahran M.H



Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin S.H.

Perincian Biaya :

|                    |   |    |            |
|--------------------|---|----|------------|
| 1. PNBP            |   |    |            |
| a. Pendaftaran     | : | Rp | 30.000,00  |
| b. Panggilan I P   | : | Rp | 10.000,00  |
| c. Panggilan I T   | : | Rp | 10.000,00  |
| d. Redaksi         | : | Rp | 10.000,00  |
| e. Pencabutan      | : | Rp | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp | 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 50.000,00  |
| 4. Materai         | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah             | : | Rp | 255.000,00 |

Disclaimer